



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 228/09122008
HARI : SENIN
TANGGAL : 9 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI accused of being a trafficking hub	3
	ASEAN Dinilai Gagal Ciptakan Demokrasi di Myanmar	3
	Menlu: Kaji Ulang Kebijakan Pangan dan Energi	4
	THAILAND: Pro-Thaksin Siap Rebut Kursi PM	4
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Hari Antikorupsi Sedunia Presiden: Jangan Diskriminatif	5
	Dubes Belanda Sesalkan Aksi Pembantaian di Rawagede	6
	B. EKONOMI	
	ENERGI: Solar dan Premium Turun Januari	7
	Indonesia Dijadikan Basis Produksi ASEAN	8
	BI predicts 2008 economic growth may reach 6.1 pct	9
	C. SOSBUD	
	TEROR MUMBAI: Lima WNI Enggan Kembali ke India	9
	D. HANKAM	--

	E. HUKUM		
		Kejagung Benarkan Penahan Andrian Kiki di Australia	10
	F. OLAHRAGA		--
	G. LINGKUNGAN HIDUP		
		Bali needs to preserve marine biodiversity	11
	III. ARTIKEL		
		Reform recruitment policy to aid RI's military budget (By Evan A. Laksmana)	11
	IV. LAIN-LAIN		
		PENEMPATAN TKI Kuota Pemerintah Korea Jauh Terlampaui	12
	V. EDITORIAL		
		Komplikasi Kasus Mumbai	13

Jakarta, 9 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. RI accused of being a trafficking hub

The National Police are investigating possible bribery in the issuance of Indonesian visas to Afghan citizens bound for Australia, following the arrest last week of two human trafficking ringleaders.

“Based on the interrogation of the two men, we are tracing the case to Kabul, because we question how so many Afghans could have secured visas,” National Police spokesman Insp. Gen. Abubakar Nataprawira said Monday.

Last Friday, police arrested two people allegedly involved in smuggling migrants from Afghanistan and Pakistan by boat to Australia.

The two alleged people smugglers, a Pakistani identified as Sakih and an Indonesian identified as Khairudin, had earlier this year landed a boatload of migrants on Australia’s Christmas Island, police said.

National Police transnational crimes director Brig. Gen. Badrodin Haiti said Sakih was a “big fish” in the human trafficking business, linked to the smuggling of Iranians, Iraqis and Afghans into Australia over the last three years.

Indonesia has long been used as a transit point for people from poor, often war-torn countries wishing to enter wealthy Australia to start a new life. In recent years, most have come from Iraq or Afghanistan. They typically fly to Indonesia before continuing to Australia aboard cramped, barely seaworthy boats.

Australia has intercepted at least five boats carrying dozens of refugees from Afghanistan, Iran, Iraq and Sri Lanka, with Indonesian crews, since September this year.

The last boat stopped by the Australian authorities was a vessel with two Indonesian crew and nine Afghan and three Iranian passengers, caught in waters near the Ashmore Islands on Nov. 19.

One of the crew, Man Pombili, 31, is now on trial in an Australian court, facing a possible 20 years in jail.

Quoting members of Australia’s Afghan community, The Australian newspaper reported last week that corrupt officials at the Indonesian Embassy in Kabul were selling visas for US\$1,500, claiming it was the starting point in an organized people-smuggling racket.

Hassan Ghulam, an ethnic Hazara community leader living in Brisbane, said Kabul’s deteriorating security conditions had forced the price of the Indonesian visas up from \$1,200 four months ago to the current \$1,500.

Foreign Ministry spokesman Teuku Faizasyah said his office had followed up on the report by seeking explanations from the embassy in Kabul, but added Jakarta doubted the claims made in the report.

“The initial response was there was no such practice. But we will continue to look into it. Visa issuance for conflict-ridden countries must be approved by Jakarta through an interdepartmental team, and takes at least two weeks for approval, not 24 or 48 hours as reported,” he said. (The Jakarta Post)

2. ASEAN Dinilai Gagal Ciptakan Demokrasi di Myanmar

ASEAN dinilai gagal membantu menciptakan demokrasi di Myanmar karena menerapkan ‘non-interference policy’ atau kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota organisasi regional tersebut.

"Non-interference policy justru membantu perkembangan rezim otoritarianisme dan diktatorial di Myanmar," kata Asisten Profesor McGill University, Kanada, Erik Martinez Kuhonta dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa.

Ia menjelaskan saat ini Myanmar dipimpin oleh junta militer yang berkuasa sejak 1988 dengan cara diktatorial. Rakyat Myanmar memprotes kebijakan junta militer dan menuntut pemberlakuan nilai demokrasi dengan berdemostrasi di jalan.

Negara anggota ASEAN tetap menerapkan non-interference policy untuk menghormati kedaulatan negara anggota dan mendorong terciptanya stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

"Padahal dukungan dari ASEAN dibutuhkan untuk membantu proses demokrasi di Myanmar," katanya dalam makalah "Walking a tightrope: democracy versus sovereignty in ASEAN's illiberal peace".

Meskipun gagal mendorong demokrasi di Myanmar, tetapi ASEAN berhasil menciptakan perdamaian dan mengurangi kemungkinan terjadi perang antarnegara anggota sehingga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara terjaga.

Saat ini pemimpin negara-negara anggota ASEAN mulai memberikan perhatian lebih pada upaya penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar dengan cara ASEAN. Dengan demikian, masa depan Myanmar diharapkan menjadi lebih baik.

Ia mengatakan, ASEAN dalam berdiplomasi menggunakan cara halus, menghindari kekerasan dan mengadakan pertemuan informal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. "Berbeda dengan negara Barat yang menggunakan cara yang tegas, transparan dan pertemuan formal," katanya.

ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. (ANTARA)

3. Menlu: Kaji Ulang Kebijakan Pangan dan Energi

Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menegaskan negara-negara berkembang di seluruh dunia harus bersatu dalam merumuskan ulang kebijakan masing-masing negara dalam hal energi, pangan, dan perubahan iklim.

Hal itu diutarakan Wirajuda saat membuka secara resmi Dialog Tingkat Tinggi Krisis Pangan-Energi dan Perubahan Iklim: Membentuk Kembali Agenda Pembangunan, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa.

Hadir dalam konferensi itu 24 perutusan negara-negara Asia Pasifik, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB/Sekretaris Eksekutif ESCAP, Dr Noeleen Heyser, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, Menteri Pertanian, Anton Apriantono, dan Duta Besar Indonesia di Bangkok, Muhammad Hatta.

Sejak beberapa tahun terakhir, katanya, dunia mengakui bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini dan ke depan berada di lingkaran Asia-Pasifik.

"Dalam krisis ekonomi global saat ini, kawasan ini tampak seperti menjadi bagian dari masalah. Namun sebetulnya, kita semua memainkan peranan penting dan beberapa negara di kawasan ini, terbukti tangguh fundamental ekonominya dalam menghadapi krisis, sehingga kita bisa memainkan peran penting," katanya.

Pemerintah Indonesia, katanya, sangat mendukung upaya perumusan kembali kebijakan bidang energi-pangan dan perubahan iklim dunia, terutama sejak Pertemuan Tingkat Tinggi Doha, sebagai momen penting dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan Millenium Development Goals.(ANTARA)

4. THAILAND: Pro-Thaksin Siap Rebut Kursi PM

Partai baru yang beranggotakan sekutu-sekutu mantan PM Thaksin Shinawatra mengaku memiliki dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintah koalisi, menggantikan pemerintah yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada pekan lalu.

Partai Puea Thai, pengganti dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dibubarkan--partai yang juga menggantikan partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin yang sebelumnya dibubarkan--menanggapi pernyataan oposisi Partai Demokrat, yang mengatakan mereka memiliki para pembelot yang cukup untuk membentuk satu koalisi.

"Sekarang kami memiliki lebih dari 222 suara (di parlemen), yang melebihi separo suara yang diperlukan untuk membentuk satu pemerintah," kata Deputy Pemimpin Puea Thai, Kanawat

Wasinsungworn, Minggu. "Mitra-mitra koalisi kami akan bergabung dengan kami. Kami sekarang memiliki cukup suara," ujarnya.

Akan tetapi, ketika menyampaikan isyarat bagi kemungkinan terjadinya kembali konflik politik baru, Juru Bicara Partai Demokrat Buranaj Smutharaks mengatakan, partainya dan sekutu-sekutu barunya memiliki 260 suara di parlemen yang memiliki satu kekuatan normal 480 kursi.

"Saya dapat menegaskan bahwa kami kini memiliki 260 suara sebagaimana yang kami katakan kemarin," kata Buranaj kepada Reuters.

Partai Demokrat sendiri, seperti diakui Buranaj, akan mengajukan ketuanya, yakni Abhisit Vejjajiva, sebagai kandidat perdana menteri apabila parlemen bersidang untuk memutuskan pemilihan pemimpin baru.

Sekjen Partai Demokrat Suthep juga menyatakan keyakinannya bahwa pihaknya memiliki kursi yang cukup untuk memerintah negara itu, setelah pembelotan partai-partai kecil dan satu faksi bekas anggota parlemen PPP. "Setiap partai (dalam koalisi kami) akan memilih Abhisit untuk menjadi perdana menteri," katanya.

Abhisit Vejjajiva, 44 tahun, lulusan Universitas Oxford, gagal merebut suara para pendukung Thaksin di perdesaan dalam pemilu setahun lalu. Namun, diperkirakan dia mendapat dukungan dari elite di kerajaan.

Partai Demokrat menurut rencana secara resmi akan meminta parlemen menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengangkat seorang perdana menteri baru, dalam usaha meredakan konflik politik yang telah melumpuhkan kerajaan itu selama beberapa bulan.

Biasanya, parlemen Thailand memiliki 480 kursi, tetapi jumlah itu tidak jelas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi pada pekan lalu terhadap PPP, yang memutuskan puluhan anggota parlemen dari PPP dan dua partai pemerintah lainnya dilarang melakukan kegiatan politik selama lima tahun.

Sejauh ini juga belum jelas kapan pemilihan sela akan diselenggarakan untuk mengisi kursi-kursi yang kosong, atau apakah kemungkinan diselenggarakan pemilu baru--keempat kalinya dalam beberapa tahun. Juga tidak jelas kapan parlemen akan bersidang untuk memilih perdana menteri baru.

Tidak lama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa lalu, kabinet sementara PPP menetapkan pemungutan suara akan diselenggarakan antara 8 dan 9 Desember, namun Raja Bhumibol Adulyadej tidak memberikan persetujuannya bagi sidang khusus tersebut.

Raja yang berpengaruh dan berusia 81 tahun itu diketahui "agak sakit" setelah absen menyampaikan pidato tradisionalnya menyambut hari ulang tahunnya yang jatuh pada Jumat pekan lalu.

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang anti-Thaksin mengakhiri blokade mereka atas bandara-bandara Bangkok pada hari setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi itu, tetapi berikrar akan turun kembali ke jalan-jalan apabila apa yang disebut mereka sebagai "calon-calon Thaksin" berkuasa kembali.

Thaksin sempat pulang sebentar ke Thailand setelah dia disingkirkan oleh kudeta militer pada 2006, dan kini tinggal di pengasingan di luar negeri setelah Oktober lalu dihukum dua tahun penjara tanpa kehadirannya karena melanggar undang-undang korupsi di negara tersebut.

Akan tetapi Thaksin menjadi semakin vokal dalam bulan belakangan ini dan berikrar akan kembali terjun ke dunia politik di negaranya.

Mantan istrinya, Pojaman, tiba di Bangkok pada Jumat pekan lalu yang mengisyaratkan bahwa usaha-usaha Puea Thai untuk membentuk satu koalisi mengalami masalah. (Suara Karya)

I :
NASIONAL :

A. **POLITIK** :

1. **Hari Antikorupsi Sedunia Presiden: Jangan Diskriminatif**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para penegak hukum tidak diskriminatif dalam memberantas korupsi. Pemerintah berjanji akan memberi ruang bagi institusi terkait untuk menegakkan negara yang bersih dari korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Presiden SBY pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari Selasa (9/12). Hadir dalam acara tersebut, ibu negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan sekitar 5.000 siswa SMU dari Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Presiden, upaya pemberantasan korupsi selama ini, baru merupakan awal untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi, membutuhkan komitmen tinggi dari atas dan kepemimpinan yang tangguh.

Presiden meminta kepada para penegak hukum agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional dan mengingatkan jajaran pemerintahan mewaspadaikan area atau kegiatan yang rawan korupsi. Yakni, pendapatan negara, wilayah anggaran, bisnis keluarga pejabat negara, pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan pajak atau bea dan cukai, pendaftaran pegawai, pengurusan izin, dan perjanjian antara pengusaha dan pemerintah.

Berantas Korupsi

Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam laporannya menyatakan sepakat menjadikan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia untuk meningkatkan semangat aparaturnegara dan penegak hukum memberantas korupsi. Saat ini kejaksanaan agung melakukan upaya represif, dengan menindak pejabat negara yang melakukan korupsi.

Kejagung juga melakukan upaya preventif dan edukatif, melalui kegiatan seminar, diskusi interaktif, dan kampanye antikorupsi. "Walaupun besok langit runtuh, dunia tempat kita berpijak akan terbelah berkeping-keping, hukum tetap harus tegak, korupsi harus tetap diberantas," katanya.

Sementara itu, Emerson Yuntho, dari ICW menilai penanganan korupsi masih terbatas pada kasus-kasus kelas dua. "Ada pelunakan perkara korupsi dalam sejumlah kasus, baik yang mendapat dukungan secara politik maupun yang melibatkan kalangan pengusaha. Korupsi memang ditangani, dan publik ingin kasus kelas kakap diproses," katanya kepada SP, Senin (8/12).

Menurutnya sejumlah kasus besar justru dikesampingkan. Ia mencontohkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto.

Presiden juga belum memiliki kontrol memadai atas pelaksana Inpres 5/2004. Bahkan, sejumlah kasus korupsi terhambat karena menunggu izin penyidikan dari Presiden.(Suara Pembaruan)

2. Dubes Belanda Sesalkan Aksi Pembantaian di Rawagede

Duta Besar Belanda Nikolaos van Dam menyesalkan aksi tentara Belanda yang melakukan pembantaian di Rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 9 Desember 1947 lalu yang mengakibatkan 431 rakyat Indonesia tewas.

Atas peristiwa itu, Pemerintah Belanda telah menyampaikan permintaan maaf.

"Berulangkali, Pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada bangsa Indonesia atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1947 itu," katanya, di sela acara Peringatan 61 Tahun Tragedi Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang, Selasa.

Dikatakannya, permohonan maaf Pemerintah Belanda itu dilakukan berkaitan dengan penderitaan yang dialami para keluarga korban Rawagede. Diperkirakan, jumlah rakyat Indonesia yang tewas akibat aksi tentara Belanda itu sangat banyak.

Atas nama Pemerintah Belanda, Nikolaos menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami para korban dan keluarga korban pembantaian.

Ia menilai, peristiwa yang mengakibatkan ratusan rakyat Indonesia tewas itu merupakan salah satu contoh yang paling menyedihkan dari cara Belanda dan Indonesia untuk saling berpisah.

"Pada 2005 lalu, Menteri Luar Negeri Bernard Bot menyampaikan, sebuah masyarakat harus mempunyai keberanian untuk menghadapi sejarahnya sendiri. Ini berlaku untuk setiap negara, termasuk Belanda dan Indonesia," katanya.

Meski demikian, ia mengatakan, kekerasan tentara Belanda pada masa kolonial terhadap rakyat Indonesia, 9 Desember 1947 lalu dilakukan demi kepentingan dan martabat bangsa Indonesia. Sedangkan jika ditinjau kembali, maka penempatan kekuatan militer Belanda pada 1947 telah menempatkan Belanda pada sisi yang salah dalam sejarah.

"Kenyataan dilaksanakannya aksi militer hingga mengakibatkan banyak korban tewas dan terluka dari kedua pihak merupakan suatu kenyataan yang pahit dan kejam, khususnya bagi bangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) Batara R Hutagalung mengatakan, Pemerintah Belanda harus memberi kompensasi kepada para korban dan keluarga korban pembantaian di Rawagede.

Pemerintah Belanda juga harus meminta maaf dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada 17 Agustus 1945, bukan 27 Desember 1949 seperti yang diakui oleh Pemerintah Belanda hingga kini. "Jika pengakuan itu dilakukan, maka Indonesia seperti anak haram, tidak diakui kemerdekaannya," katanya.

Ia menilai, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Belanda, maka hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda saat ini tidak normal, karena ada beberapa utang kehormatan Belanda yang harus dipenuhi, tapi belum juga dipenuhi.

Ia menyarankan Pemerintah Indonesia agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, apabila hal-hal tersebut tidak juga dipenuhi oleh Pemerintah Belanda. (Media Indonesia)

B. EKONOMI

1. ENERGI: Solar dan Premium Turun Januari

Pemerintah memastikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar bisa diturunkan pada Januari 2009 bila perkembangan harga minyak dunia terus menunjukkan penurunan.

Saat ini pemerintah masih mengkaji secara intensif besaran penurunan harga jual kedua jenis bahan bakar itu dan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, terutama menunggu hasil pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 15 Desember mendatang.

Menurut Wakil Presiden M Jusuf Kalla, harga premium dan juga solar akan diturunkan pada bulan depan. Namun, besaran penurunannya belum bisa disampaikan hingga menjelang pergantian tahun nanti. "Untuk premium, ya Januari-lah, juga solar," ujar Kalla, usai menyerahkan hewan kurban, di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (8/12).

Pemerintah per 1 Desember sudah menurunkan harga premium Rp 500 menjadi Rp 5.500. Harga tersebut sudah mencapai keekonomiannya. Sementara harga solar hingga kini Rp 5.500 per liter. Dirjen Migas Evita Legowo beberapa waktu lalu mengatakan, harga solar tersebut masih cukup jauh dari harga keekonomiannya yang mencapai Rp 6.900 per liter.

Wapres mengakui, harga premium memang sudah tidak disubsidi lagi. Hal ini dikarenakan konsumen premium umumnya mobil-mobil pribadi milik orang mampu. "Memang sekarang kita tidak akan subsidi lagi, kita akan subsidi sektor yang benar-benar komersial, itu ada di solar. Sedangkan premium kan lebih banyak ke mobil pribadi kalau yang komersial ada truk pengangkut, mana ada sedan yang memakai solar?" ujar Wapres.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, penurunan harga BBM mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain harga internasional dan berapa besar subsidi. Hal lain yang menjadi faktor penentu penurunan harga adalah hasil pertemuan OPEC pada 15 Desember mendatang.

"Mengenai perhitungannya nanti kita tetapkan kemudian setelah ada rata-rata dari harga terakhir yang dihitung, tapi kita tunggu juga harga tanggal 15 Desember ini, OPEC mau apa. Jadi, harga belum bisa ditentukan sekarang," kata Wapres.

Terkait rencana penurunan harga BBM pada Januari 2009, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, penetapan harga baru (penurunan-Red) BBM bersubsidi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 yang besar kemungkinan bisa dilakukan penghematan lebih banyak. Sebab, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) APBN 2009 yang lebih rendah, yakni 80 dolar AS per barel, dibandingkan asumsi ICP APBN 2008 sebesar 95 dolar AS per barel.

Dia memperhitungkan besaran penghematan yang bisa dicapai sebesar Rp 3.200 per liter dari tiga jenis bahan bakar yang disubsidi. "Tentunya penurunan harga untuk solar dan premium bisa lebih signifikan. Tetapi, dari Rp 3.200 itu dialokasikan 50 persen atau setara Rp 1.600 untuk subsidi BBM dan 50 persen sisanya untuk dana cadangan," kata dia.

Dalam perhitungannya, dia memerinci dari Rp 1.600 dibagi untuk dua jenis harga, yakni masing-masing Rp 800 per liter untuk solar dan Rp 800 untuk premium. "Nantinya harga jual solar bisa turun Rp 800 per liter menjadi Rp 4.700 dan premium menjadi Rp 5.200. Premium kita

hitung kembali pada harga masih Rp 6.000 dikurangi Rp 800, karena penurunan baru beberapa hari saja," kata Harry Azhar.

Saat ini, pemerintah tetap menggunakan patokan harga jual produk BBM di pasar Singapura (Mean of Platts Singapore/MOPS) plus alpha yang mencakup biaya pengadaan dan biaya operasi dengan menggunakan persentase.

Menurut dia, jika harga minyak mentah dunia bisa bertahan di level 40 dolar AS per barel selama Januari 2009 nanti, maka penghematan yang bisa diperoleh dalam sebulan mencapai Rp 2,5 triliun.

"Dana itu bisa setengahnya digunakan lagi untuk subsidi harga dan menambah dana cadangan. Perlunya dana cadangan ini karena memang tidak ada yang bisa memastikan harga minyak tidak bergejolak lagi. Belum lagi kita harus melihat bagaimana dampak dari kebijakan OPEC yang akan memangkas produksinya nanti. Ini juga menjadi suatu kekhawatiran kita bersama" ujarnya.

Diakuinya, menghadapi situasi minyak dunia yang kini mengalami tren penurunan dan sebelumnya sempat mengalami lonjakan tinggi dalam sejarah minyak dunia, mengharuskan pemerintah untuk mencadangkan dana yang siap digunakan untuk menjaga pasokan BBM di dalam negeri bisa terus terkendali (terjangkau-Red).

Harry Azhar juga mengatakan, sepanjang 2008 diperoleh hitungan penghematan subsidi Rp 10 hingga Rp 15 triliun. "Tetapi, pemerintah justru enggan mencadangkan sisa dana yang dihemat dengan menyatakan terganjal kurs dolar, padahal kurs dalam hitungan rata-rata setahun Rp 9.700, berbeda sedikit sekitar Rp 4.000 rupiah dari asumsi kita," ujarnya.

Berdasarkan perdagangan di pasar internasional, harga minyak mentah jatuh ke posisi terendah empat tahun. Kontrak minyak mentah light sweet untuk pengiriman Januari ditutup pada 40,81 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, turun tajam 2,86 dolar AS dari penutupan Kamis lalu.

Kontrak New York bersentuhan batas psikologis 40 dolar AS dalam perdagangan harian, menyusut menjadi 40,50 dolar, level terendah sejak Desember 2004. Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari merosot tajam 2,54 dolar AS menjadi mantap pada 39,74 dolar AS, posisi terendah yang terakhir terlihat pada Januari 2005.

Harga minyak memulai pekan dengan penurunan tajam setelah OPEC yang memproduksi 40 persen dari minyak mentah dunia pada akhir pekan lalu menunda keputusan pemotongan produksi hingga pertemuan 17 Desember mendatang. (Suara Karya)

2. Indonesia Dijadikan Basis Produksi ASEAN

Perusahaan raksasa elektronik China, Grup Changhong menambah investasinya di Indonesia melalui PT Changhong Electric Indonesia sebesar Rp 130 miliar. Dengan tambahan investasi tersebut, PT Changhong akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi utama untuk memenuhi pasar di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki jumlah penduduk sekitar 500 juta.

Menurut Ketua Grup Changhong Zhao Yong, Grup Changhong masuk ke Indonesia sejak 10 tahun yang lalu melalui kerja sama dengan PT CEU. Kerja sama tersebut meliputi pembangunan pasar Indonesia, membangun pabrik, hingga membangun jaringan pemasaran. Hingga saat ini, pabrik telah beroperasi dengan daya produk per tahun, televisi 350.000 unit, 150.000 unit AC, 300.000 unit DVD, dan 100.000 unit produk digital network. Pada saat yang sama, Changhong juga telah mewujudkan produksi TV dan AC yang diekspor ke Singapura, Vietnam, Malaysia, Turki, Argentina, dan sejumlah negara lain.

"Seandainya produk kita sebelum ini yang masuk ke Indonesia bagaikan menapakkan kaki di Indonesia melalui berdirinya joint venture ini, kami telah menapakkan kaki yang satunya lagi di daratan ini," katanya.

Wakil Ketua I Kamar Dagang Indonesia Komite Tionghoa (KIKT) Didi Darwis menambahkan, pembukaan PT Changhong Electric Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kerja sama antara Indonesia-China, baik di bidang politik, perdagangan, maupun budaya. Kerja sama tersebut dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Pada bulan September tahun ini, nilai investasi China di Indonesia mencapai US\$ 27 miliar. Target kerja sama tahun ini mencapai US\$ 30 miliar.

"Pembukaan PT Changhong membuktikan keberhasilan kedua negara. Pada saat krisis global saat ini, langkah ini memastikan tumbuhnya perbaikan ekonomi dan kepercayaan ekonomi," katanya.

Menurut Didi, besarnya investasi China yang masuk ke Indonesia karena adanya jaminan suasana yang kondusif bagi investasi dari pemerintah Indonesia. Ke depan, Didi mengharapkan akan lebih banyak lagi perusahaan China beroperasi di Indonesia.

Direktur Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian (Deperin) Syarif Hidayat mengharapkan, langkah PT Changhong tersebut bisa secara nyata mengambil peran industri bisnis di Indonesia. "Kita percaya bahwa China dengan kekuatan ekonomi yang penting di dunia, menjadikan investasinya di Indonesia menguntungkan kedua belah pihak," paparnya.

Syarif menjelaskan, pertumbuhan industri elektronika pada 2006-2008 stabil di atas 10 persen dan mampu menyumbang Gross Domestic Bruto (GDB) sekitar 13,6 persen. Industri elektronika ini mempunyai peran penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia akan memberikan kemudahan investasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2007 dan PP No 62/2008, pemerintah memberikan potongan pajak sekitar 30 persen dari nilai investasi selama lima tahun. (Sinar Harapan)

3. BI predicts 2008 economic growth may reach 6.1 pct

Bank Indonesia (BI or central bank) Governor Boediono has expressed optimism that the country's economic growth rate can reach 6.1 percent this year, despite the sluggish world economic growth.

"The sluggishness (of the world economy) will affect national economic growth in accordance with the reduced growth of exports, investment and public consumption. However, the Indonesian economy as a whole is estimated to grow 6.1 percent in 2008," Boediono said at the Parliament Building here on Tuesday.

Meanwhile, inflationary pressures were diminishing. The November inflation rate was at 0.12 percent (mtm) or 11.68 percent, which was lower than the inflation rate in November last year.

The BI Governor said that the decline in oil and commodity prices had eased domestic inflationary pressures. He was optimistic that the inflation rate would continue to decline in 2009.

"The decline in inflationary pressures is predicted to continue in 2009, so that it could reach a target range of 6.5 -7.5 percent," he said.

BI also predicted that the economic growth in 2009 would be above five percent.

BI Deputy Governor Hartadi A Sarwono earlier said that the 2009 economic growth was estimated at five percent.

"The economic growth at around five percent is still very good. And it's estimated to be above five percent, it could be 5.3 or 5.4 percent, he said.

He said that the economic growths of all countries in the world declined due to the ongoing global financial crisis in the US.

Indonesia was also affected by the crisis because its exports would also tumble, he said.

The world even predicted that the US would fall into recession, especially if the economic policy of President-elect Barack Obama was considered lack credible, he said. (ANTARA)

C. SOSBUD

1. TEROR MUMBAI: Lima WNI Enggan Kembali ke India

Lima warga negara Indonesia asal Bali yang terjebak dalam peristiwa serangan teroris di Mumbai, India, 26 November 2008, tiba dengan selamat di Pulau Dewata, Minggu (7/12). Mereka mengaku trauma dan enggan bekerja kembali di luar negeri, terutama India.

Kelima warga Bali itu adalah Anak Agung Komang Triastina asal Kabupaten Jembrana, I Gusti Ayu Putu Sri Rahayu (Tabanan), Ni Kadek Edi Darmayanti (Gianyar), Ni Luh Gde Mahendrayani (Nusa Penida, Klungkung), dan Ni Komang Sri Arini (Bangli). Kelimanya bekerja sebagai terapis spa di Hotel Trident Oberoi, Mumbai.

Kepulangan mereka antara lain difasilitasi Kedutaan Besar Indonesia untuk India. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian negara yang memastikan keselamatan mereka ketika peristiwa mencekam itu.

Trauma

Komang Triastina, yang ditunjuk mewakili keempat rekannya, mengatakan, "Terima kasih untuk semuanya." Triastina mengungkapkan, dia dan keempat rekannya masih trauma. Mereka

tidak ingin lagi mengalami peristiwa seperti tanggal 26 November itu, "tersekap" dalam salah satu kamar hotel selama sekitar 36 jam. Dalam rentang waktu itu, mereka hanya minum air.

"Belum ada pikiran kembali ke luar negeri, apalagi India. Mungkin kami semua memilih untuk bekerja di Bali saja," katanya.

Mereka berangkat ke India secara terpisah dan waktu berbeda, yakni 5-10 bulan lalu. Rata-rata penghasilan mereka sekitar 800 dollar AS per bulan. (Kompas)

D. HANKAM : Tidak Ada

E. HUKUM :

1. Kejagung Benarkan Penahan Andrian Kiki di Australia

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) membenarkan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan, telah ditahan Pemerintah Australia.

"Adrian Kiki Ariawan ditahan pemerintah Australia," kata Ketua Tim Pemburu Koruptor Kejagung, Muchtar Arifin, di Jakarta, Selasa (9/12).

Menurut Muchtar, Kejagung sendiri meminta agar Adrian Kiki Ariawan itu, diadili sehingga bisa diekstradisi.

Dikatakan, pihaknya segera mengirim tim ke Australia untuk merundingkan proses peradilan Adrian Kiki Ariawan.

"Hingga bisa diekstradisi ke Indonesia," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Kejagung terus memburu aset para koruptor yang disimpan di luar negeri, salah satunya aset milik mantan bos Bank Surya, Adrian Kiki Ariawan di Australia.

Terpidana kasus BLBI dari Bank Surya, Adrian Kiki Ariawan, bersembunyi di Australia. Setelah sebelumnya divonis seumur hidup secara in absentia dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp1,5 triliun.

Tim Pemburu Koruptor menargetkan mengambil kembali aset 10 koruptor yang lari ke luar negeri seperti di Singapura, Swiss dan Australia.

Andrian Kiki Iriawan (Direktur Bank Surya) dan Bambang Sutrisno (Wakil Direktur Bank Surya) pada 2002, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Putusan itu, tidak dihadiri oleh kedua terdakwa (in absentia).

Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dana BLBI sebesar Rp1,5 triliun.

Majelis hakim dalam putusannya, menyatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Bambang Sutrisno bersama-sama Kiki mengucurkan dana BLBI kepada grup perusahaan yang ternyata 103 perusahaan itu fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Perbuatan kedua terdakwa itu, kata hakim, melanggar pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 24 c UU No 3/1971 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum Arnold Angkouw, SH.

Andrian Kiki Iriawan melarikan diri ke Australia dan Bambang Sutrisno ke Singapura.(Jurnal Nasional)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Bali needs to preserve marine biodiversity

Bali, as one of the world's most famous tourist destinations, must preserve its marine diversity, apart from its culture and traditions, a local official said.

Bali does not have natural resources such as gold, silver or coal mines, as it only has a tourism industry that is expected to help improve the local people's welfare, said I Gde Nurjaya, head of Bali's provincial tourism office, said here on Tuesday.

He said the arts, traditions, and cultural potentials of the Balinese people must be maintained to support the tourism, he said.

In developing tourism, the government must not overexploit the country's natural resources, he said. Tourism should be developed based on a sustainable development principle which could guarantee the welfare of the current and future generations, he said.

During January-August 2008, Bali, which is known for its beautiful beaches, received a total of 1.2 million foreign tourists, an increase of 20 percent from around one million visitors last year.

The Indonesian culture and tourism ministry has set the country's optimistic 2009 foreign tourist attraction target at 6.7 million, or 6.2 percent above the figure achieved in 2008 (6.4 to 6.5 million).(ANTARA)

III. ARTIKEL

:

1. Reform recruitment policy to aid RI's military budget (By Evan A. Laksmana)

Vice President Jusuf Kalla remarked during the recent IndoDefence Expo 2008 that the strengthening of Indonesia's defense sector by prioritizing operational readiness and the main weapons system remains a national imperative.

This statement, however, does not explicitly acknowledge the underlying problem of an underfunded military. The possible takeover of the Indonesian Military (TNI) businesses and the aging weaponry displayed during the Marine Corps anniversary recently are examples of how crucial the insufficient defense budget is.

Are we simply cursed with an everlasting underfunded military?

Since its inception during the Independence War, the military has never had adequate funding from the government, even during the heyday of Sukarno and Soeharto.

Today, although enjoying a much larger defense budget than before, defense officials claim the government is only funding around 30 percent of its current needs.

The debate surrounding this claim notwithstanding, the problem of defense budgeting is about many inter-related issues, including the TNI's business activities, the lack of transparency and accountability in defense management, doctrinal stagnation and the financial capacity of the central government.

The complexities attached to each issue seem to lead to a "fatalistic" argument that the problem of defense budgeting will always persist.

The possible long-term solution to this age-old conundrum actually lies not in Jakarta, but all the way over in Magelang, at the Military Academy.

In hindsight, we could begin by looking at the fact that the largest portion of Indonesia's military budget goes to personnel salaries.

Lex Rieffel and Jaleswari Pramodhawardani argued in a paper published last year that personnel costs account for 45 percent of the total defense outlay in 2007, or around Rp 14.6 trillion, to support more than 437,000 troops and civilians.

Clearly the answer here is not to simply cut back the personnel in one go. This certainly would cause major national instability if soldiers and bureaucrats were faced with possible sudden unemployment. This much history has taught us.

Instead, the long-term solution we might want to consider here is the revamping and tightening of the TNI's recruitment policies at the academy level.

Such recruitment reform at the academy level could pave the way in the future to cut personnel defense spending gradually in the long run (quantitatively), while increasing the pay scale of soldiers and officers to a sufficient level (qualitatively).

More importantly, however, this could help solve the problem of "the inflation of generals" and promotional logjam where, to put it crudely, there are many officers, but few positions available.

Scholars argued that this promotional logjam began to surface during the late Soeharto and early *reformasi* periods when there was an increasing frequency of massive personnel reshuffles while the tenure of military commands was, in many instances, decreasing.

This was seen as a consequence of the increasing size of the officer corps by leaps and bounds in the 1960s through 1970s.

From the 59 cadets who graduated in the first class in 1960, the military academy later graduated 433 cadets in 1965. Later on, the number dropped to 85 graduates in 1976 only to rise again to 102 in 1980 and eventually 281 in 1991 -- resulting in an overall average of around 250 cadets per year.

The increasing size of the officer corps along with the domination of certain classes that held back succeeding classes have been argued by scholars to have contributed not only to a massive personnel reshuffle, but also to intense rivalry and feuds.

Especially amid the increasingly competitive promotional space as envisaged by the late Gen. Benny Moerdani, some officers with political connections back then could easily rise through the ranks.

During the New Order, it seems plausible to argue that the size of the officer corps was not a problem as ABRI's (as the TNI was known during Soeharto's era) "dual function" (*dwifungsi*) and secondment of officers to civilian positions (*kekaryaan*) could provide additional billets for middle and high-ranking officers.

Moreover, while personnel, budgetary and even perhaps political considerations may have guided decisions about cadet intake, the idea during the 1960s of developing a modern military academy and consolidating military education should also be factored in.

Is this still the case today? In late October this year, the Military Academy inducted 531 cadets, with 304 for the Army, 127 for the Navy and 100 for the Air Force.

In the absence of *kekaryaan* and *dwifungsi*, as well as the shrinking number of posts available to officers in the post-Soeharto bureaucracy, should we not ask why the number of cadets inducted this year is higher than average?

Finally, by reforming recruitment policies, we could not only have a more efficient and well-paid military force, but we could also increase the quality of Indonesia's future military leaders.

Political scholar Sukardi Rinakit has shown that there has been a decline in the quality of the officer corps as younger officers today were only average students in high school with an average grade of 6.5, compared with the high-quality students in the early 1970s and 1980s, whose average grade was 8.0. This, he argued, could make future military leaders more aggressive and less open-minded.

This argument might put too much emphasis on the significance of intellectual acuity and neglect leadership and other qualities, but an increasingly complex security environment coupled with a hardly breathing domestic defense establishment will require us to eventually incorporate the idea of a "soldier scholar" into our lexicon.

In other words, the challenge of repositioning the military to tackle the increasingly complex security environment in an even more complex democratic setting would at the very least require a mind at work. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN :

1. PENEMPATAN TKI Kuota Pemerintah Korea Jauh Terlampaui

Belum sampai tutup tahun 2008, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hingga November 2008 ini berhasil menempatkan sekitar 12.000 TKI ke Korea Selatan berdasarkan program antarpemerintah (government to government/G to G). Capaian ini sudah jauh melampaui kuota 9.500 TKI yang disediakan Pemerintah Korea Selatan. Bahkan, untuk Desember ini diperkirakan dapat ditembus jumlah 12.500-13.000 TKI.

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, pencapaian angka 12.000 TKI untuk Korea Selatan memang prestisius. Jika dibandingkan dengan penempatan TKI pada 2006 atau sebelum ditangani BNP2TKI, penempatan TKI hanya mencapai 1.200 orang, sehingga jumlah TKI yang berhasil ditempatkan tahun ini mengalami kenaikan hingga 1.000 persen. Untuk mengetahui lebih jauh terkait penempatan TKI ke Korea Selatan ini, berikut petikan wawancara HU Suara Karya dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Jumat (5/12) pekan lalu.

Apa kiat Anda memimpin BNP2TKI sehingga mencapai target penempatan melebihi kuota 9.500 TKI ke Korea untuk program G to G?

Alhamdulillah, target permintaan sebanyak 9.500 orang TKI selama dua tahun yang akan berakhir bulan Desember ini sudah tercapai, bahkan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah Korea. Tepatnya per 14 November 2008, kita sudah menempatkan 12.000 TKI formal ke Korea.

Prestasi ini tercapai berkat kekompakan, semangat, dan dedikasi tinggi dari teman-teman di BNP2TKI. Kiat utama yang kita lakukan adalah memudahkan prosedur penempatan serta pengurusan dokumen bagi calon TKI yang akan bekerja di Korea, sesuai prinsip penempatan TKI di luar negeri yaitu mudah, murah, dan aman.

Prestasi program G to G ini murni prestasi pemerintah atau juga menyertakan pihak-pihak tertentu?

Sesuai namanya program government to government dengan Pemerintah Korea Selatan, maka hanya pemerintah yang berhak menempatkan TKI, dalam hal ini BNP2TKI. Di luar itu tidak boleh. Ketentuan itu sudah sesuai mekanisme Employment Permit System di Korea. BNP2TKI dalam melaksanakan kewajiban ini juga dikukuhkan oleh UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Jadi, pihak swasta tidak bisa terlibat dalam penempatan TKI melalui program G to G?

Ke depan, kita berharap pemerintah hanya akan menjadi fasilitator saja. Kita ingin pihak swasta dapat ikut dilibatkan. Masalahnya, negara bersangkutan seperti Korea yang sejauh ini justru menginginkan pemerintah yang boleh menempatkan TKI.

Indonesia kini masuk negara terbesar dalam penempatan tenaga kerja migran ke Korea. Bagaimana upaya BNP2TKI dalam mempertahankan prestasi tersebut?

BNP2TKI akan terus menjaga kesiapan petugas pemerintah dalam melayani tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Kami akan pertahankan kualitas pelayanan yang selama ini sudah kami lakukan, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan ke Korea, sehingga pihak user tidak ada yang dikecewakan, sementara TKI juga mendapatkan penghargaan yang memadai dari masing-masing user.

Apakah keberhasilan dalam penempatan TKI ke Korea ini karena ada upaya terobosan tertentu?

Saya akui, besarnya angka penempatan TKI ke Korea yang kini dicapai BNP2TKI merupakan keberhasilan prestisius jika dibanding pada 2006 yang hanya mencapai 1.200 TKI. Jumlah tersebut mengalami kenaikan fantastis.

Untuk mencapai prestasi di atas kuota, BNP2TKI melakukan berbagai terobosan, utamanya dalam hal kemudahan perekrutan calon TKI serta membenahi prosedur pengurusan dokumen perjanjian kerja yang diperlukan, salah satunya berupa standard labour contract (SLC). Dengan demikian, calon TKI yang teregister di BNP2TKI dapat dengan cepat, mudah, dan gratis mendapatkan SLC.

Dulu, SLC diperjualbelikan oleh calo seharga Rp 30 juta-Rp 40 juta, di samping calon TKI sulit memperolehnya. Tapi, sesuai prinsip penempatan G to G yang murah, mudah, dan aman, sekarang calon TKI ke Korea tidak perlu berbelit-belit untuk dapat berangkat asal sesuai persyaratan. Namun, calon TKI untuk Korea juga diwajibkan bersertifikat bahasa Korea, lolos tes kesehatan, serta minimal berpendidikan SMP.(Suara Karya)

V. EDITORIAL

:

1. Komplikasi Kasus Mumbai

Hubungan India-Pakistan yang cenderung memburuk dikhawatirkan akan memuncak pada konfrontasi militer secara terbuka di antara kedua negara.

Ketegangan hubungan kedua negara bertetangga itu merupakan komplikasi atas persetujuan lama, yang dalam perkembangan terakhir diperburuk oleh kasus serangan teroris ke Mumbai, India, pekan lalu.

Suasana terasa memanas, lebih-lebih setelah tersiar spekulasi dan gosip, pejabat tinggi India sempat mengancam menyerang Pakistan karena Pakistan menjadi basis kaum ekstremis yang menyerang Mumbai.

Perkembangan ini tentu saja memprihatinkan, lebih-lebih karena sudah ada presedennya kedua negara terlibat dalam perang terbuka. Paling tidak sudah tiga kali, tahun 1948, 1965, dan 1971, kedua negara terlibat dalam perang terbuka sejak berpisah tahun 1947.

Kecemasan bertambah karena kedua negara mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dari semangat permusuhan, yang bersumber pada persengketaan Kashmir. Isu Kashmir senantiasa menjadi sensitif dalam pasang surut hubungan kedua negara seperti terlihat dalam kasus serangan ke Mumbai selama tiga hari sejak 26 November.

Paling tidak 171 orang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kaum ekstremis yang belakangan diketahui berbasis di Pakistan. Situasi memanas cepat setelah kalangan pejabat India menyatakan, para penyerang merupakan anggota kelompok militan yang dibina dinas intelijen Pakistan untuk merecoki kekuasaan India di Kashmir.

Pemerintah Pakistan sudah membantah tuduhan itu, dan mendesak Pemerintah India untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Namun, tidak dapat dibantah kenyataan, kaum ekstremis bergerak dari Pakistan untuk menyerang sejumlah sasaran di Mumbai pekan lalu.

Petugas keamanan Pakistan sendiri mengaku telah menangkap 12 orang dalam penggerebekan terhadap kamp latihan yang digunakan kaum ekstremis yang menyerang Mumbai. Tidak dapat disangkal, Pakistan kerepotan oleh kiprah kaum fundamentalis yang berkolaborasi dengan jaringan Al Qaeda dalam menggoyahkan pemerintah dan pemerintahan Pakistan.

Semakin jelas pula, India dan Pakistan secara faktual maupun potensial menjadi rawan sebagai sasaran serangan teroris. Mau tidak mau kedua negara dituntut bekerja sama mengatasinya, bukan sebaliknya.

Atas dasar itu, kedua negara perlu menahan diri untuk mencegah perang yang tidak hanya meminta korban jiwa dan kerugian harta tidak sedikit, tetapi juga memperlemah upaya bersama melawan ancaman terorisme.(Kompas)

Jakarta, 9 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu